

**PENDIDIKAN POLITIK DI KALANGAN PELAJAR PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN 2024 DI SMK NEGERI 1 WARUREJA**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat dalam Rangka Penyelesaian Studi

Strata 1 untuk Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan

Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan

Oleh :

UKTUFIA ROKHMATUN NAZILAH

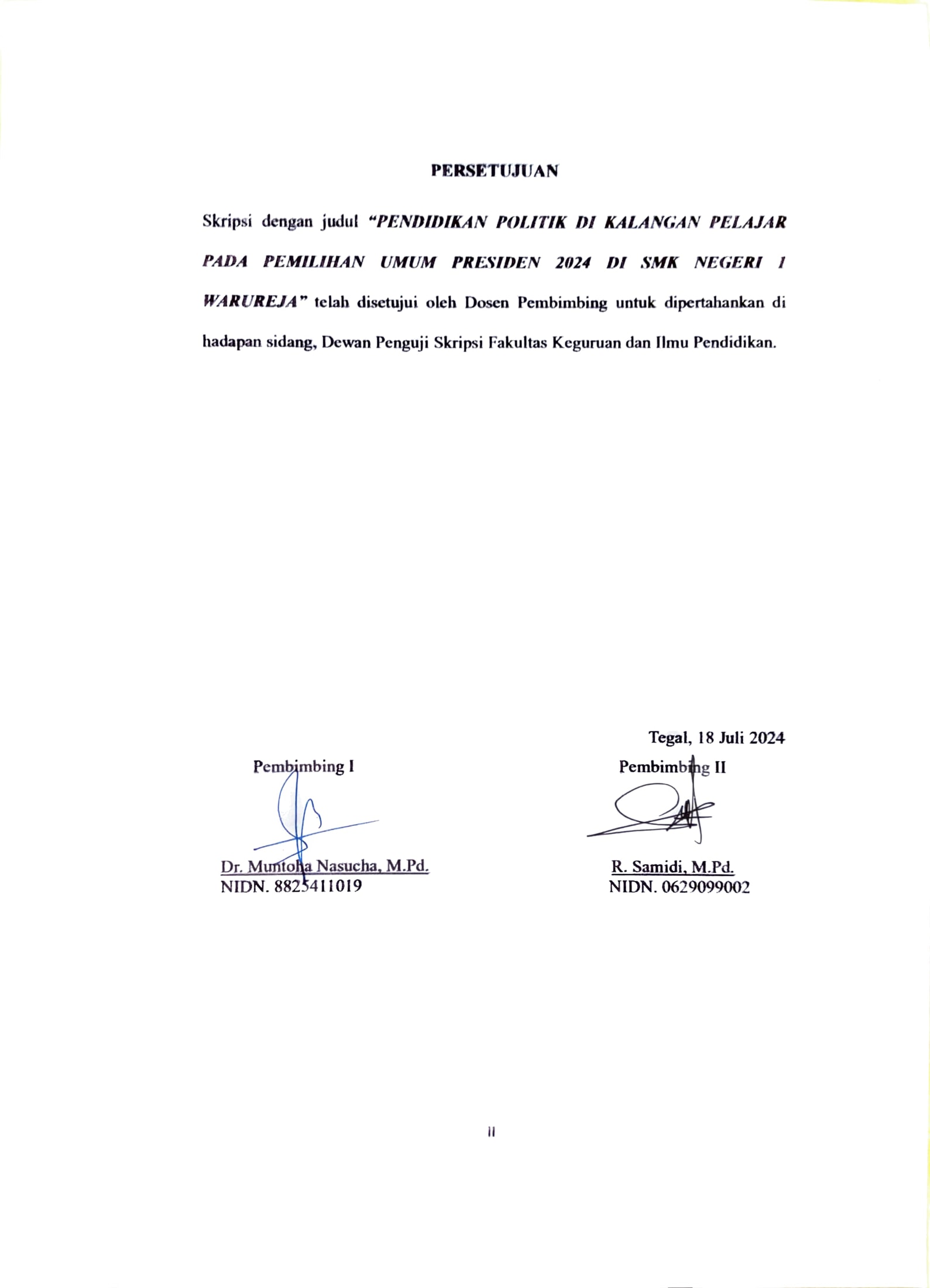
1220600005

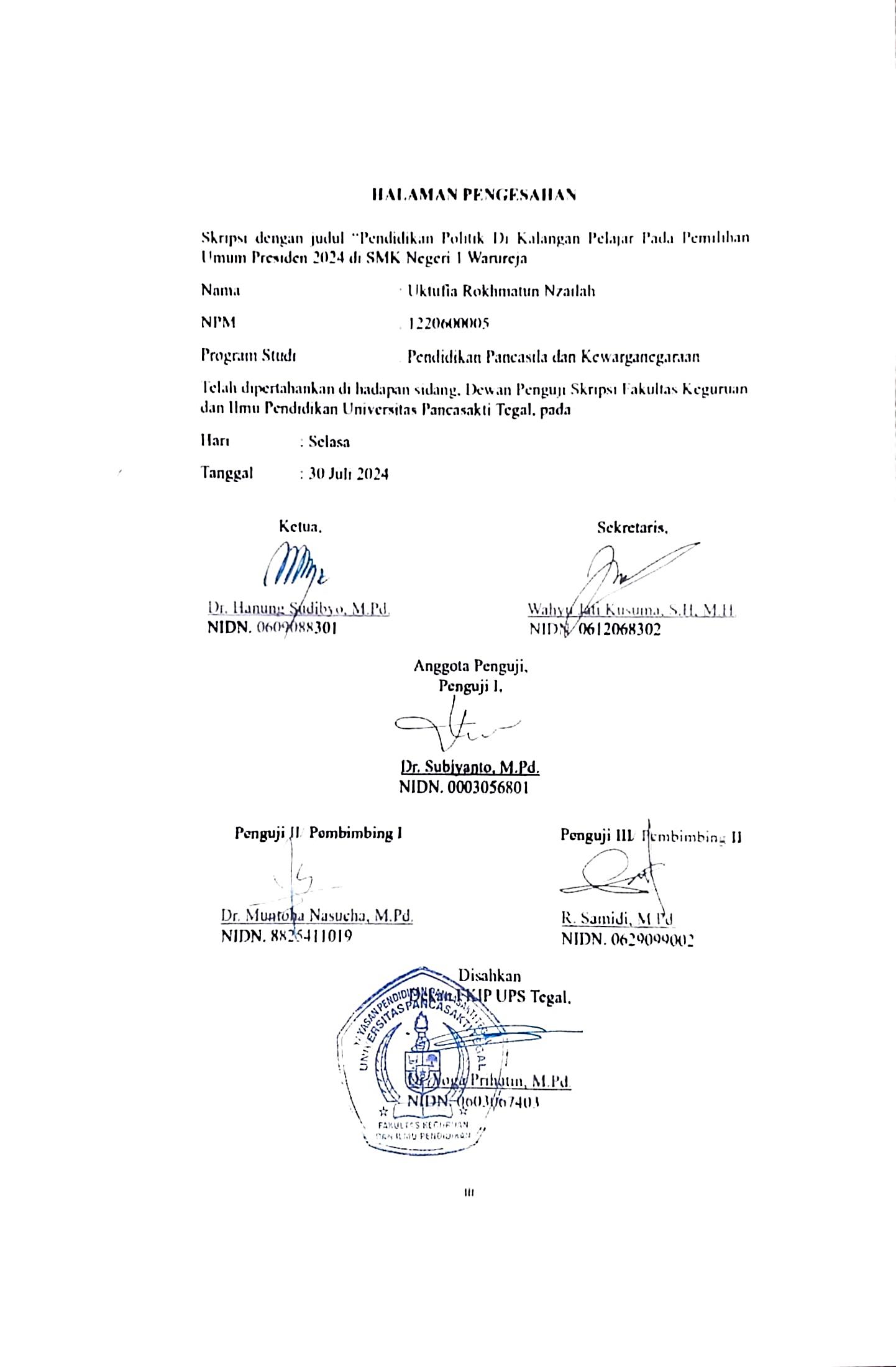
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

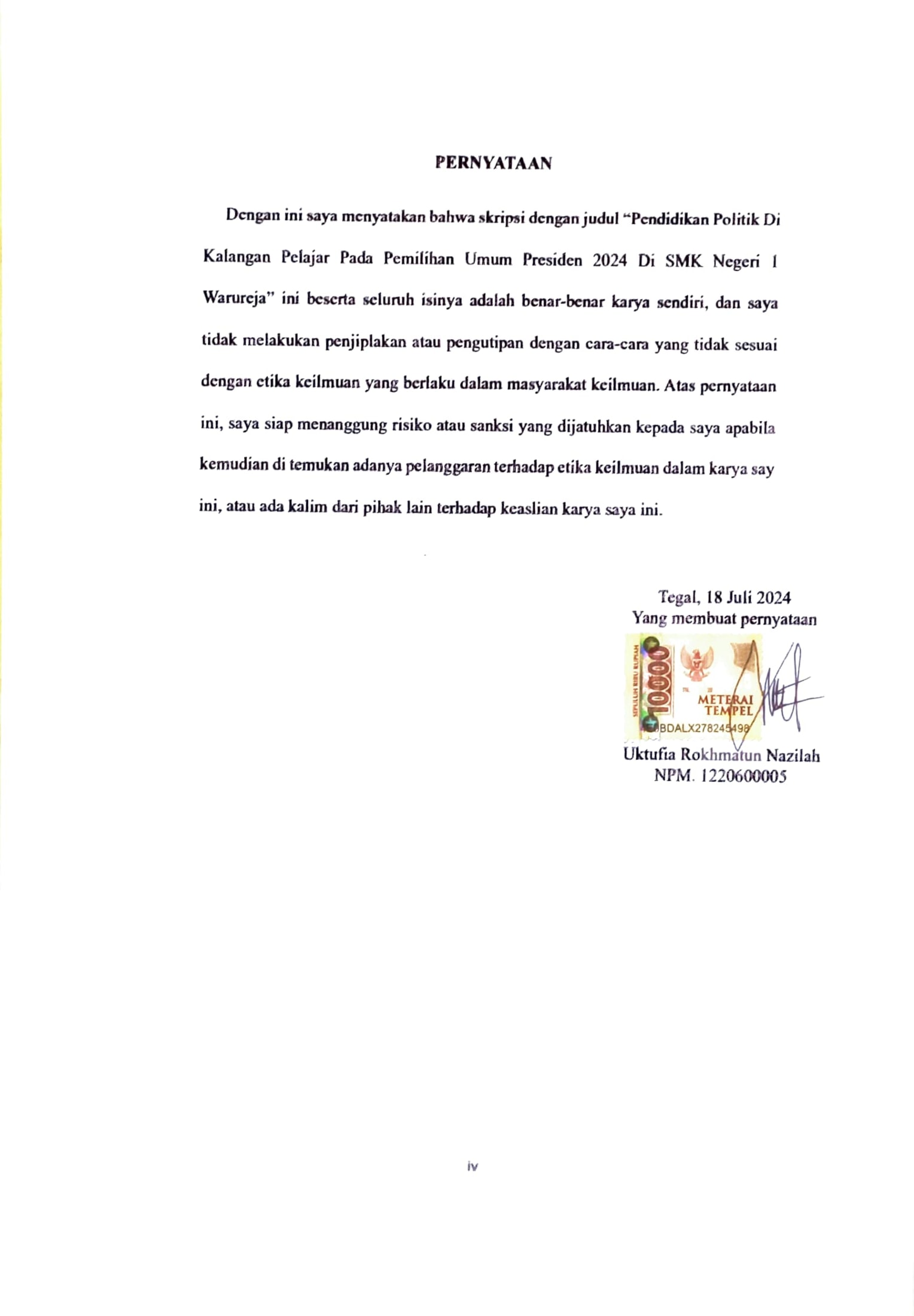
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2024**

****

****

****

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**MOTTO**

*“Rahasia kesuksesan adalah mengetahui yang orang lain belum ketahui”*

*(Aristotle Onassis)*

**PERSEMBAHAN**

Penulis Persembahkan karya ini untuk :

1. Orang tua saya yang saya sangat sayangi Bapak Al-imron dan Mama Ernawati dan Almarhuma Ibu Soimah.
2. Kakak Perempuan saya Nisa Sya’fa Atul Izzah, yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat.
3. Adik-adikku Tasya Nilashadinda, Akhmad Nisful Hilal dan Ahmad Bunayya Rikhil Manun, yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
4. Terimah kasih atas doa dan dukungan dari seluruh keluarga besar dan saudara-saudaraku.
5. Teman-teman dirumahku, PR Ipnu-Ippnu Sigentong, Karang Taruna Sigentong dan teman seperjuanganku khususnya angkatan 2020 Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang selalu memberikan semangat dan memberikan motivasi.

**PRAKATA**

Dengan panjatkan puja dan puji Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pendidikan Politik Di Kalangan Pelajar Pada Pemilihan Umum Presiden 2024 Di SMK Negeri 1 Warureja”. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) Jurusan Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan Universitas Pancasakti Tegal.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat. Dari berbagi pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Dr. Yoga Prihatin, S.Pd, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal.
2. Wahyu Jati Kusuma, S.H, M.H. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pancasakti Tegal.
3. Dr. Muntoha Nasucha, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan arahan selama proses penulisan skripsi.
4. R. Samidi, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan selama proses penulisan skripsi.
5. Seluruh Dosen Pengajar di Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pancasakti Tegal.
6. Kedua Orang Tuaku Kakak, dan Adik tercinta yang telah memberikan dukungan dan doa demi keberhasilan dalam proses pembuatan skripsi.
7. Kepala Sekolah dan Bapak, Ibu Guru Mapel Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMK Negeri 1 Warureja, yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian.

**ABSTRAK**

**UKTUFIA ROKHMATUN NAZILAH.** 2024. *Pendidikan Politik di Kalamgan Pelajar Pada Pemilihan Umum Presiden 2024 di SMK Negeri 1 Warureja.* Skripsi. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Pancasakti Tegal.

Pembimbing I : Dr. Munthoha Nasucha, M.Pd.

Pembimbing II : Raden Samidi, M.Pd.

Kata Kunci : Pendidikan Politik, Pemilihan Umum Presiden 2024.

Permasalahan yang dikaji pada penelitian ini berkaitan dengan Pendidikan politik di kalangan pelajar pada pemilihan umum Presiden 2024 di SMK Negeri 1 Warureja. Dimana Pelajar di dalam pendidikan politik itu sangat rendah karena pelajar kurang tertarik dalam politik dan juga di capaian pemebelajaran kurikulum PPKn tidak ada sehingga tenaga pendidik menyampaikan hanya sekilas ketika mendekati pesta demokrasi.

Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui bentuk kegiatan untuk ketertarikan pelajar terhadap pendidikan politik untuk memenuhi kebutuhan hak pilihnya di dalam masyarakat terutama pada pemilihan umum presiden 2024. Yang sering dilakukan kegiatan pelajar itu mengikuti organisasi, mengikuti pemilihan ketua osis dan mengikuti sosialisi pesta demokrasi tentang pemilihan umum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif, serta jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif studi kasus dan desain penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data, analisis data, dan penyajian hasil analisis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi data dengan cara membandingkan data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil Penelitian ini menunjukan bentuk kegaiatan pendidikan politik pada pemilihan umum yang terjadi pada SMK Negeri 1 Warureja diantaranya adalah kegiatan mengikuti organisasi yang diikuti sebagaian pelajar yang minat dalam berorganisasi untuk melatih menjadi seorang pemimpin di sekolah maupun masyarakat, sedangkan mengikuti pemilihan ketua osis dilakukan pada satu tahun sekali dalam periode jabatan diikuti oleh semua pelajar dan guru-guru di sekolah untuk melatih hak pilihnya sebelum terjun dimasyarakat dan biasanya mengikuti sosialisasi pesta demokrasi tentang pemilihan umum diikuti semua pelajar tidak hanya pelajar yang beranjak usia 17 tahun biasanya dilakukan menjelang pemilihan umum. Untuk ketertarikan pelajar pada pendidikan politik di SMK Negeri 1 Waureja yaitu dengan cara partisipasi pelajar yang timbul karena keinginan untuk memenuhi kebutuhan hak pilihnya di dalam masyarakat terutama dalam pemilihan umum.

**ABSTRACT**

UKTUFIA ROKHMATUN NAZILAH. 2024. *Political Education Among Students In The 2024 Presidential Election At SMK Negeri 1 Warureja.* Thesis. Pancasila And Civic Education. Faculty Of Teacher Training And Education. Pancasakti Tegal University.

Pembimbing I : Dr. Munthoha Nasucha, M.Pd.

Pembimbing II : Raden Samidi, M.Pd.

Keywords : Political Education, 2024 Presidential Election.

The problem studied in this research is related to political education among students in the 2024 Presidential election at SMK Negeri 1 Warureja. Where students in political education are very low because students are less interested in politics and also in the laerning outcomes of the PPKn curriculum there is no so that the teaching staff convevys only a glimpse when approaching the democratic party.

The aim of this research is to find out the types of activities for students’ interest in political education to meet the needs of their voting rights in society, especially in the 2024 presidential general election. What students often do is joining organizations, taking part in the election of student council presidents and taking part in democratic party socialization regarding general elections.

This research uses a qualitative research method that uses a descriptive approach, and this type of research uses qualitative case study research and in this research design the researcher uses data collection, data analysis, and presentation of analysis results. In this research, researchers used data triangulation by comparing data from observations, interviews and documentation.

The results of this research show that the forms of political education activites in the general elections that took place at vocational school SMK Negeri 1 Warureja included activities taking part in organizations which were participated in by some students who were interested in organizing to train to become leaders in school and society, while taking part in the election of student council leaders was carried out one year once in the term of office, all students and teachers at school participate in exercising their voting rights before entering society and usually taking part in the socialization of democratic parties regarding general elections, attended by all student, not just students who have turned 17 years old, usually carried out before the general election. For students’ interest in political education at SMK Negeri 1 Warureja, this means students participation arises from the desire to fulfil the need for voting rights in society, especially in general elections.

**DAFTAR ISI**

**JUDUL** i

**PERSETUJUAN** ii

**HALAMAN PENGESAHAN** iii

**PERNYATAAN** iv

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN** v

**PRAKATA** vi

**ABSTRAK**  viii

**DAFTAR ISI** x

**DAFTAR TABEL** xiii

**DAFTAR GAMBAR** xiv

**DAFTAR LAMPIRAN** xv

**BAB 1 PENDAHULUAN** 1

1.1. Latar Belakang Masalah 1

1.2. Identifikasi Masalah 8

1.3. Pembatasan Masalah 8

1.4. Rumusan Masalah 9

1.5. Tujuan Penelitian 9

1.6. Manfaat Penelitian 10

1.6.1. Manfaat Teoretis 10

1.6.2. Manfaat Praktis 10

**BAB 2 KAJIAN TEORI** 11

2.1. Landasan Teori 11

2.1.1. Pendidikan Politik 11

2.1.2. Konsep Pemilihan Umum Presiden 2024 14

2.1.3. Pendidikan Kewarganegaraan 19

2.1.4. Budaya Politik 24

2.1.5. Budaya Organisasi Literatur 30

2.2. Penelitian Terdahulu 34

2.3. Kerangka Pikir 37

**BAB 3 METODE PENELITIAN** 39

3.1. Pendekatan Penelitian 39

3.1.1. Pendekatan Penelitian 39

3.1.2. Desain Penelitian 41

3.2. Prosedur Penelitian 41

3.3. Sumber Data 43

3.4. Wujud Data 44

3.5. Teknik Pengumpulan Data 45

3.6. Teknik Analisis Data 48

**BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** 50

4.1. Hasil Penelitian 50

4.1.1 Sejarah SMK Negeri 1 Warureja 50

4.1.2 Profil Sekolah SMK Negeri 1 Warureja 51

4.1.3 Visi dan Misi Sekolah SMK Negeri 1 Warureja 52

4.1.4 Sumber Daya Manusia SMK Negeri 1 Warureja 52

4.1.5 Daftar Informan SMK Negeri 1 Warureja 56

4.1.6 Deskripsi Observasi 57

4.1.7 Deskripsi Wawancara 61

4.1.8 Deskripsi Dokumentasi 82

4.2. Pembahasan 83

**BAB 5 PENUTUP** 91

5.1. Simpulan 91

5.2. Saran 92

**DAFTAR PUSTAKA** 93

**LAMPIRAN**………………………………………………………….……...95

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Data Guru dan Karyawan SMK Negeri 1 Warureja 50

Tabel 2. Daftar Informan Penelitian SMK Negeri 1 Warureja 54

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Kerangka Pikir 38

Gambar 2.1 Desain Penelitian 41

Gambar 3.1 Triangulasi Data 47

**DAFTAR LAMPIRAN**

*Lampiran 1 Surat Izin Studi Lapangan (Penelitian)*

*Lampiran 2 Pedoman Observasi*

*Lampiran 3 Pedoman Wawancara*

*Lampiran 4 Pedoman Dokumentasi*

*Lampiran 5 Hasil Observasi*

*Lampiran 6 Hasil Pedoman Wawancara*

*Lampiran 7 Hasil Dokumentasi*

*Lampiran 8 Triangulasi*

*Lampiran 9 Jurnal Bimbingan*

**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia, pemilihan umum telah menjadi bagian dari tradisi demokrasi sebagai negara demokratis. Pemilu adalah keharusan bagi negara demokrasi untuk secara rutin mengadakan pemungutan suara guna membentuk pemerintahan yang demokratis. Secara umum, pemilihan umum dipandang pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dengan demikian, pemilihan umum menunjukkan bahwa otoritas tertinggi berada pada rakyat, karena melalui proses ini rakyat memilih pemimpin dan perwakilan mereka. (Sunarso, 2015).

Pemilihan umum adalah realisasi dari sistem demokrasi serta juga mewujudkan nilai dari sila ke empat yang berbunyi “kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat ke bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” yang tercantum dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sejak tahun 1955, pemilihan umum hingga saat ini, termasuk pemilu serentak tahun 2019, telah mengalami transformasi signifikan dalam berbagai segi seperti kerangka hukum, penyelenggara, proses, partisipan, struktur, kelembagaan, pelanggaran, serta manajemennya, oleh karena itu, pembelajaran politik yang komprehensif sangat penting untuk meningkatkan partisipasi politik dan pemahaman masyarakat, khususnya bagi pemilih pemula seperti pelajar. Pendidikan politik adalah salah satu cara yang efektif untuk mencapai hal ini, karena kesadaran politik masyarakat merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan partisipasi politik (Yanuar, 2017).

Pemilihan umum perlu diadakan secara rutin karena ada beberapa alasan. 1) pandangan dan aspirasi masyarakat terus berubah dan berkembang terhadap berbagai aspek kehidupan bersama, 2) kondisi kehidupan masyarakat dapat berubah karena perubahan, dalam dunia internasional maupun faktor internal dan eksternal di dalam negeri. 3) problem aspirasi dan pandangan masyarakat dapat juga terjadi karena pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan kesadaran masyarakat, khususnya di kalangan pemilih baru yang mungkin memiliki pandangan berbeda dengan generasi sebelumnya. 4) penting untuk mengadakan pemilihan umum secara teratur agar terjaminnya pergantian kepemimpinan negara, baik dieksekutif maupun legislatife (Asshiddiqie, jimly, 2016).

Kerangka hukum pemilu telah mengalami perubahan dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya yang diatur secara terpisah dalam tiga undang-undang berbeda, namun sekarang diatur dalam satu undang-undang nomor 7 tahun 2017 (santoso, topo dan ida buhiyarti.: 256). Dengan distukannya subtansi dari tiga undang-undang terdahulu yang mengatur pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan umum anggota DPD, DPR, DPRD, serta pelaksanaan pemilu yang digabungkan menjadi satu dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan tetap konsistensi dalam pengaturan, mengurangi pertentangan antar norma, menghindari duplikasi akturan, serta mengedepankan kepastian hukum dan mempermudah pemahaman serta pelaksanaan bagi semua pihak terkait pemilu. (Akmaluddin, 2022).

Pendidikan politik sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kritisitas pelajar terhadap hak pilih mereka. Hal ini juga membantu mereka memahami proses demokrasi, termasuk pelaksanaan pemilu yang dilakukan secara sungguh-sungguh. Kualitas pemimpin dapat diukur dari integritas, kejujuran, keadilan, amanah, serta dari sejauh mana mereka dapat menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Barang siapa yang menduduki kursi kepemimpinan harus unggul, menyampaikan kebenaran, dengan keadilan dan kepercayaan terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Selain itu, pendidikan politik adalah pemahaman tentang konsep politik, khususnya dalam konteks pemilihan umum, yang efektif untuk mencegah konflik dalam aktivitas politik di tengah masyarakat indonesia yang beragam dan terbagi-bagi dalam berbagai kelompok munculnya permasalahan konflik dalam politik. Dalam hal ini pelajar, siswa, atau siswa diharapkan mengetahui pengetahuan mengenai pendidikan politik, sehingga pelajar tidak lagi menjadi tempat aspirasi masyarakat dalam pemilu.

Pandangan pelajar mengenai pendidikan politik, kurangnya dalam pemahaman politik, yang mereka tau politik itu hanya tentang pemilihan dan bagi-bagi uang atau lain sebagainya. Sebagian pelajar menganggap politik itu menyeramkan dan menakutkan, karena anggapan pelajar di dalam politik banyak sebagian pejabat politik yang melakukan korupsi, akibatnya pelajar memilih tidak peduli terhadap politik, serta memilih golput pada saat pemilu itu, padahal 1 suara sangat berpengaruh untuk kemajuan bangsa, apalagi sebagai generasi penerus bangsa.

Kurangnya partisipasi politik pelajar dalam pemilihan umum Presiden 2024 disebabkan oleh beberapa faktor dari dalam pendidikan politik. (1) karena calon pemimpin yang diusulkan dalam proses demokrasi tidak memenuhi harapan pemilih. (2) pemilih mulai merasa bosan dengan siklus lima tahunan dari proses demokrasi yang tidak menghasilkan perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat. (3) masyarakat tidak lagi menganggap pemilihan umum (seperti pilkada, pemilu legislatif dan pemilu presiden) sebagai hal yang penting atau fundamental dalam perkembangan kehidupannya sehari-hari mereka.

Heri ruslan. 2012. Inilah 3 penyebab rendahnya partisipasi politik. Online.

<http://news.republika.co.id/diakses> 15 Februari 2024.

Guru PPKn memiliki peran kursial dalam meningkatkan literasi politik di sekolah, terutama dengan memperluas pengetahuan siswa tentang kewarganegaraan Indonesia. Di Tengah antusiasme yang tinggi terhadap politik dan tata negara, pembelajaran PPKn perlu menarik dan memikat bagi para pelajar yang ingin mendalami ilmu pengetahuan ini.

Pendidikan politik memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran pemilih agar mereka memiliki pemahaman yang baik terkait pemilu. Tujuannya adalah sebagai berikut: a. Menyebarkan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilihan. b. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan. c. mendorong partisipasi pemilih dalam proses pemilihan (Eko handoyo dan Puji lestari, 2017:1).

Dari situ, pendidikan politik yang disampaikan oleh pendidik kepada siswa diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik dalam pemilihan umum. Implementasi pendidikan politik juga dapat dimulai di lingkungan sekolah menengah kejuruan (SMK) rata-rata sudah berumur 17 tahun dan memiliki hak pilih untuk memilih seorang pemimpin yang adil dan jujur. Pendidikan politik di sekolah diharapkan dapat memberdayakan, meningkatkan rasa nasionalisme dan kecintaan siswa terhadap negara.

Pada menjelang pemilihan umum Presiden 2024, para calon presiden melakukan berbagai strategi untuk memenangkan dukungan, termasuk berinteraksi dengan masyarakat, mahasiswa dan pelajar guna memperoleh dukungan mereka. Pembelajaran PPKn tidak terlepas dari pendidikan kewarganegaraan, yang memainkan peranan penting dalam meningkatkan kesadaran politik, yang dapat dicapai melalui pendidikan politik, tidak hanya melalui lembaga pendidikan resmi, tetapi juga melalui interaksi dengan masyarakat luas. Selain itu, pendidikan politik juga dikenal sebagai Upaya mengubahan sistem politik yang melibatkan masyarakat untuk memastikan bahwa mereka memahami prinsip-prinsip hukum yang baik dan terstruktur, dengan tujuan membentuk masyarakat yang dapat mengintegrasikan etika dan kebijakan dalam mencapai tujuan politik (Hasibuan, 2022).

Dalam informsai berdasarkan observasi yang di dapat pada hari senin, tanggal 4 maret 2024 bertempat di SMK Negeri 1 Warureja, bahwasanya siswa diwajibkan menerima ilmu pengetahuan mengenai pendidikan politik di sekolah. Akan tetapi pemerintah terutama menteri pendidikan menerapakan kurikulum Merdeka dalam pembelajaran sehingga dalam mata pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan ada yang diubah terutama materi pendidikan politik didalam kurikulum Merdeka sekarang tidak ada, sehingga peserta didik kurang dalam pengetahuan politik. Walaupun masih berkaitan dengan empat pokok capaian pembelajaran seperti Undang-undang 1945, Pancasila, Bhineka tunggal ika, NKRI. Selain itu juga faktor yang disebabkan peserta didik kurang minat dalam pembelajaran politik sehingga literasi Pendidikan politik siswa kurang.

Hal ini, pemahaman awal peserta didik mengenai pandangan politik yang masih kurang memahami, dalam keberadaan pendidikan poltik pada pemilihan umum Presiden 2024, yang peserta didik ketahui bahwa pendidikan politik itu hanya semata-mata pelajaran umum biasa yang sama dengan mata pelajaran lainnya yang disampaikan oleh pengajar, padahal pendidikan politik sangat penting untuk kepentingan bangsa dan negara, terutama dalam pemerintahan Negara Indonesia.

Berdasarkan jurnal penelitian literasi Pendidikan politik di sekolah beberapa studi yang terkait dengan topik ini telah dilakukan penelitian Nadita Anggi dengan judul “Pelaksanaan Pendidikan politik bagi pemilih pemula di SMA N 4 Tanjung Jabur Timur untuk menghadapi pemilihan umum” Tahun 2023. Menyatakan bahwa untuk memfokuskan pada permasalahan pada pemilih pemula, karena banyak pemilih pemula yang belum tahu apa itu Pendidikan politik dikalangan pelajar. Sedangkan penelitian Zaenal Ahmad, Usman Thamrin dan Rudy Santoso dengan judul “Sosialisasi Pendidikan politik bagi pemilih pemula di SMK Negeri 5 Kabupaten Bulukumba”Tahun 2023.Menyatakan bahwa untuk memfokuskan pemahaman politik mereka masih terbatasnya pandangan pelajar terhadap Pendidikan politik, dengan adanya penyuluhan pendidikan politik, pemahaman pemilih pemula akan meningkat pada peserta didik. Karenanya, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan hal tersebut **“Pendidikan Politik Di Kalangan Pelajar Pada Pemilihan Umum Presiden 2024 Di SMK Negeri 1 Warureja”.**

**1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka didapatkan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman pendidikan politik pada pemilihan umum Presiden 2024.
2. Pemahaman politik yang masih rendah di SMK Negeri 1 Warureja.
3. Rendahnya minat pelajar di SMK Negeri 1 Warureja terhadap literasi politik pada pemilihan umum Presiden 2024.
4. Kurangnya pandangan pelajar pada literasi politik tentang pemilu Presiden 2024 di SMK Negeri 1 Warureja.
5. Rendahnya pendidikan politik pada pelajar di SMK Negeri 1 Warureja.
   1. **Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah perlu dilakukan untuk menghindari meluasnya penafsiran maka penelitian ini yaitu Pandangan literasi Pendidikan politik siswa pada pemilihan umum Presiden 2024 di SMK Negeri 1 Warureja.

**1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang pada penelitian ini maka diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan pendidikan politik di SMK Negeri 1 Warureja?
2. Apa faktor penyebab pendidikan politik siswa di SMK Negeri 1 Warureja rendah pada pemilihan umum Presiden 2024?
3. Bagaimana cara menanamkan literasi politik tentang pemilu Presiden 2024 di SMK Negeri 1 Warureja?

**1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui pandangan pendidikan politik di SMK Negeri 1 Warureja.
2. Untuk mengetahui apa faktor penyebab pendidikan politik siswa di SMK Negeri 1 Warureja rendah pada pemilihan umum Presiden 2024
3. Untuk menanamkan literasi politik tentang pemilu Presiden 2024 di SMK Negeri 1 Warureja.

**1.6 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teori maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

**1.6.1 Secara Teoretis**

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan terkait mengenai literasi pendidikan politik di kalangan pelajar pada pemilihan umum Presiden 2024.
2. Hasil studi ini diharapkan bisa memberikan ilmu pengetahuan tambahan kepada pembaca mengenai isu-isu yang diteliti.

**1.6.2 Secara Praktis**

1. Bagi guru

Mampu menginternalisasi mengenai pendidikan politik di kalangan pelajar pada pemilihan umum Presiden 2024.

1. Bagi peserta didik
2. Membantu peserta didik dalam memahami pendidikan politik di kalangan pelajar pada pemilihan umum Presiden 2024.
3. Peserta didik menjadi lebih literate pada pemilihan umum Presiden 2024.
4. Dapat meningkatkan pada pendidikan politik terhadap mata pelajaran PPKn.
5. Bagi peneliti
6. Menambah pengetahuan dan wawasan dalam pelaksanaan pendidikan politik di kalangan pelajar pada pemilihan umum Presiden 2024.
7. Untuk mengembangkan pandangan pendidikan politik di kalangan pelajar pada pemilihan umum Presiden 2024 di SMK Negeri 1 Warureja.
8. Menerapkan ilmu pengetahuan atau wawasan yang telah didapatkan selama kuliah.

**BAB 2**

**KAJIAN TEORI**

**2.1 Landasan Teori**

Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai persepsi pendidikan politik di kalangan pelajar pada pemilihan umum, Dimana pelajar kurang memahai mengenai pendidikan politik ketika dalam pemilihan umum. oleh karena itu perlu dilakukan penjabaran mengenai penelitian ini sebagai berikut :

**2.1.1 Pendidikan Politik**

1. **Pengertian Pendidikan Politik**

Seacara umum pendidikan berperan membentuk individu yang mampu memahami dan menyadari posisi politiknya dalam masyarakat. Ini menunjukan bahwa pendidikan politik memainkan peran kursial dalam membentuk pola pikir dan rasa tanggung jawab seorang warga negara, lebih lanjut, pendidikan politik juga menjadi faktor penting dalam upaya meningkatkan kehidupan politilk. (Pasaribu : 2017).

Pendidikan politik jalur formal adalah Pendidikan lewat struktur resmi yakni jenjang kependidikan jalur sekolah. Sedangkan pendidikan politik non-formal bisa dikatakan adalah pendidikan diluar sistem pendidikan (sekolah) dengan kata lain yang dilaksanakan oleh Masyarakat umum. Dengan kata lain cara Pendidikan yang diterima baik di lingkungan keluarga dan masyarakat luas (Purwanto dalam Pasar ibu, 2017).

Pendidikan politik bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman politik siswa, pelajar atau peserta didik, hal ini akan memberikan motivasi aktif khususnya kaum milenial karena latar belakannya mengenai pendidikan politik

Melalui pendidikan politik, dapat terlihat bagaimana budaya politik suatu negara tercermin, khususnya budaya politik Indonesia yang berakar niali-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang mencerminkan kearifan lokal juga berperan sebagai panduan dalam memahami wawasan politik, termasuk dalam menganalisis dan menanggapi peristiwa politik yang menjadi fokus utama dalam pendidikan politik (Kartono dalam Hartono : 2016 : 19).

1. **Tujuan Pendidikan Politik**

Tujuan pendidikan politik di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, yang mencakup:

1. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan tanggung jawab masyarakat dalam kehidupan sosial, kebangsaan dan negara.
2. Selain itu, tujuan tersebut juga mencakup usaha untuk meningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan sosial, kebangsaan dan negara.
3. Dan usaha untuk meningkatkan kemandirian, kedewasaan serta memperkuat karakter bangsa guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Secara lebih luas Kartono (1989) dalam Handoyo dan Lestari (2017), merinci tujuan pendidikan politik yakni: (a) membuat rakyat (individu, klien, anak didik dan warga masyarakat), mampu memahami situasi sosial politik yang penuh konflik, berani memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang tidak mantap, aktivitasnya diarahkan pada proses demokrasi sejati. (b) sanggup memperjuangkan kepentingan serta ideologi tertentu, khususnya yang berkolerasi dengan keamanandan kesejahteraan hidup bersama dan memperhatikan peranan insani dari setiap individu sebagai warganegara, mengembangkan semua bakat dan kemampuannya (pengetahuan, wawasan, sikap, keterampilan, dan alin-lain), agar ia dapat aktif berpartisipasi dalam proses politik demi Pembangunan bangsa dan negara.

1. **Fungsi Pendidikan Politik**

Pendidikan politik berfungsi sebagai sesuatu hal yang esensial dan terus-menerus dilakukan dalam masyarakat. Pendidikan politik sama pentingnya dengan eksistensi politik itu sendiri. Politik tanpa pendidikan politik adalah kebutaan sedangkan Pendidikan politik tanpa politik adalah kehampaan. Sederhananya, efektivitas berjalannya sistem politik ditentukan oleh pendidikan politik (Handoyo, Lestari :2017).

Pendidikan memiliki dua fungsi utama terhadap masyarakat, yakni menjaga keberlangsungan pendidikan bertanggung jawab dalam memelihara struktur sosial dan nilai-nilai yang sudah ada (fungsi Preserveratif), serta mengarahkan transformasi sosial untuk merespon tantangan masa depan (fungsi direktif). Selain itu pendidikan juga bertanggung jawab dalam :

1. Mempersiapkan individu sebagai manusia
2. Menghasilkan tenaga kerja yang siap untuk berkerja
3. Membentuk warga negara yang memiliki tanggung jawab. (Dwi Siswoyo, dkk.2013: 20-21).

**2.1.2 Konsep Terhadap Pemilihan** **Umum Presiden 2024**

1. **Pengertian Pemilihan Umum Presiden 2024**

Pemilihan umum merupakan tahap untuk memilih individu membentuk pemerintahan. Ini dilakukan untuk menciptakan masyarakat demokratis di mana orang memilih pemimpin berdasarkan suara terbanyak. Pemilihan rapat umum, metode pemilihan anggota dewan yang paling popular sebagai upaya yang paling umum memilih, umum, bebas, tetapi tetap rahasia, jujur, adil dan sesuai dengan nilai-nilai pancasila dan Undang-undang dasar 1945 di seluruh wilayah Indonesia (Fauzi, 2023).

Pemilihan umum (Pemilu) adalah suatu proses demokrasi untuk menentukkan pergantian pemerintahan dimana warga negara dapat berpartisipasi dalam memilih wakil mereka di parlemen serta pemimpin nasional atau local secara langsung, terbuka, tanpa tekanan, rahasia, adil, dan aman (A. Ubaedilah, 2016:95-96).

Masyarakat memiliki otoritas penuh atas penyelenggaraan pemilu, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara langsung, hak rakyat untuk memilih secara langsung dengan cara yang mereka inginkan tanpa gangguan memilih secara bebas dan keinginannya tanpa tekenan, tanpa diskriminasi berdasarkan agama, ras, budaya, suku, gender, kelas sosial laninya, hak bagi semua warga negara yang memenuhi syarat untuk memberikan suara rahasia dan dilindungi privasinya, dengan kejujuran, sebagai prinsip yang harus dijunjung tinggi dengan hukum dan layak untuk pemilihan (Kadir, 2022).

Pemilihan umum sering dianggap sebagai perayaan demokrasi di negara-negara yang menerapkan sistem demokrasi. Termasuk di Indonesia pemilu dianggap sebagai bentuk konkret dari dan memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. Pemilu di Indonesia diatur agar berlangsung dengan prinsip akses terbuka, partisipasi umum, kebebasan, kerahasiaan integritas, serta keadilan sesuai dengan konsep negara kesatuan republik Indonesia (Wardhani, 2018).

Kuswati (2019) Dengan maksud untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan pemilu secara menyeluruh, serta sebagai kesempatan yang berharga untuk mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda dan pelajar, mengenai pentingnya pemilu. Ini didukung oleh keyakinan bahwa pendidikan politik adalah inti dari penyederhanaan nilai-nilai pancasila dalam konteks pemilu.

1. **Tujuan Pemilu Presiden 2024**

Tujuan dari pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) adalah untuk memilih wakil dari penduduk dan wilayah yang akan mendirikan pemerintahan yang demokratis, stabil, dan didukung secara luas oleh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang pro rakyat, memberikan prioritas kepada kepentingan masyarakyat, serta untuk merealisasikan harapan atau tujuan yang diinginkan negara. Pemilihan umum *(general election)* juga merupakan alat penting dalam menyalurkan hak-hak asasi manusia warga negara. (Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara, Op. Cit. hlm. 416).

Menurut Jimly, ada empat tujuan penyelenggaraan pemilu:

* 1. untuk memastikan bahwa pergantian pengelolaan kepemimpinan pemerintahan dengan keteraturan dan kedamaian
  2. untuk memungkinkan penggantian pejabat yang mewakili kepentingan rakyat di Lembaga perwakilan.
  3. Untuk menjalankan prinsip kedaulatan yang berada di tangan rakyat
  4. Untuk menerapkan prinsip HAM kepada seluruh penduduk negara. <http://www.informasiahli.com/2015/08/pengertian-pemilihan-umum-tujuan-fungsi-syarat.html> diunduh tanggal 15 Februari 2024.

1. **Prinsip Pemilu Presiden 2024**

Dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, terdapat beberapa asas pemilu yang harus dijalankan. Asas-asas tersebut termasuk:

* 1. Mandiri

Pemilihan umum harus diadakan secara independen oleh lembaga penyelenggara, seperti Komisi pemilihan umum (KPU) dan badan pengawas pemilu (Bawaslu), untuk menjamin netralitas dan kemandiriannya.

* 1. Proporsial

Pemilihan umum harus mengakomodasi berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat secara adil dan seimbang, baik dalam hal perwakilan partai politik maupun masyarakat umum.

* 1. Jujur

Pemilu harus dilakukan dengan integritas, tanpa kecurangan, penipuan, atau manipulasi hasil pemilihan umum.

* 1. Professional

Penyelenggaraan pemilihan umum harus dilakukan dengan penuh profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka, serta mematuhi kode etik dan standar kerja yang telah ditetapkan.

* 1. Adil

Harus dilaksanakan secara adil tanpa adanya diskriminasi, memastikan kesempatan yang sama bagi semua peserta pemilihan umum untuk bersaing dengan adil.

* 1. Akuntabel

Penyelenggaraan harus memiliki tanggung jawab dan kapabilitas bertanggung jawabkan atas tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraannya.

* 1. Berkepastian Hukum

Harus ditegakkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan adanya ketentuan yang jelas dan dapat dimengerti oleh semua pihak yang terlibat.

* 1. Efektif

Penyelenggaraan pemilihan umum harus efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, termasuk dalam hal partisipasi pemilih, keamanan dan integritas pemilu.

* 1. Tertib

Pemilihan umum perlu dilaksanakan dengan disiplin, memastikan keamanan dan ketertiban tetap terjaga selama berlangsungnya proses tersebut.

* 1. Efesien

Pelaksanaan harus dilakukan secara efisien, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal.

* 1. Terbuka

Harus diselenggarakan secara terbuka dan transparan, dengan memberikan kesempatan bagi partai politik, calon, dan pemilih untuk memperoleh informasi yang diperlukan tentang proses pemilihan umum.

**2.1.3** **Pendidikan Kewarganegaraan**

* 1. **Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan**

Pendidikan kewarganegaraan adalah pedagogis yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik, yang memuat materi pemerintahan, kewarganegaraan, Sejarah dan kebangsaan (Muchson & Samsuri, 2015).

Terutama dalam konteks pendidikan kewarganegaraan penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan nilai-nilai negara, serta mengembangkan sikap yang cinta tanah air dikalangan pelajar. Ini termasuk dalam kegiatan negara seperti pemilihan umum serentak di seluruh Indonesia (Kaelan, 2016).

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pengetahuan yang bertujuan memperluas pemahaman serta keterampilan dalam melaksanakan hak dan kewajiban bagi warga negara. Bagi masyarakat Indonesia, hal ini didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, pelajar memiliki tanggung jawab penting dalam membangun karakter cerdas, kepribadian baik agar dapat menjadi penduduk yang bertanggung jawab.

Pendidikan kewarganegaraan secara umum mengulas bagaimana individu berinteraksi dengan sesama warga negara dan negaranya. Mata pelajaran ini mendalami konsep-konsep tersebut, sehingga pemahaman yang mendalam tentang dasar-dasar Pendidikan kewarganegraan sangat kursial (R.samidi dan Suharno, 2019).

Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional menjelaskan: Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi sebagai evaluasi murid yang memiliki pemahaman dan keterampilan dasar dalam hubungannya dengan sesama warga negara, selain itu Pendidikan ini juga bertujuan untuk melindungi negara dengan menghasilkan warga negara yang siap dan setia kepada negara dan bangsa.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk melaksanakan dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional dengan mengembangkan keterampilan, membentuk karakter dan membangun peradaban yang mulai bagi bangsa, serta untuk memperkaya kehidupan bangsa melalui pengembangan potensi siswa agar menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak baik, sehat, berilmu, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang baik dengan prinsip demokrasi dan akuntabilitas.

Sedangkan tujuan secara luas dari Pendidikan kewarganegaraan adalah menciptakan warga negara yang aktif dan memiliki komitmen terhadap nilai-nilai serta praktik dalam masyarakat (R.Samidi dan Wahyu Jati K, 2020).

* 1. **Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan**

Kewarganegaraan berarti keanggotaan masyarakat dalam satu negara sehingga menjadi jelas hak dan kewajibannya terhadap negara. sementara Pendidikan kewarganegaraan adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan semua hal yang berkaitan dengan keanggotaan masyarakat di dalam sebuah negara. dengan memperoleh Pendidikan kewarganegaraan diharapkan peserta didik dapat memahami dengan mudah peranya sebagai individu, dan warga negara dalam interaksi atau hubungannya dengan sesame warga negara di dalam negara.

Ada 8 aspek ruang lingkup Pendidikan kewarganegaraan yang didalamnya berisi tata kehidupan, nilai-nilai serta peraturan yang mengatur kehidupan manusia sebagai anggota Masyarakat di suatu negara. yaitu :

* 1. Persatuan dan kesatuan bangsa

Aspek pertama adalah persatuan dan kesatuan bangsa yang meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, bangga sebagai bangsa Indonesia, cinta lingkungan, partisipasi dalam bela negara, sumpah pemuda, keutuhan NKRI.

* 1. Norma, hukum dan peraturan

Aspek yang kedua adalah macam-macam norma, hukum dan peraturan. Aspek ini meliputi: tata tertib disekolah, peraturan dalam kehidupan keluarga, peraturan-peraturan daerah, norma di Masyarakat, norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum dan peradilan internasional sistem hukum dan peradilan nasional.

* 1. Hak asasi manusia

Aspek ketiga ialah hak asasi manusia. Aspek ini meliputi: hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, hak dan kewajiban anak, penghormatan dan perlindungan HAM. Semuanya manusia mempunyai hak dan kewajiban warga negara maka dari itu HAM di Indonesia sangat dijunjung tinggi.

* 1. Kebutuhan warga negara

Aspek yang berikutnya adalah kebutuhan warga negara yang meliputi: harga diri sebagai Masyarakat, gotong royong, kebebasan untuk berorganisasi, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat, menghormati Keputusan Bersama, prestasi diri, kesamaan kedudukan warga negara.

* 1. Konstitusi negara

Aspek kelima yaitu konstitusi negara. aspek ini meliputi; konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, hubungan antara dasar negara erat kaitannya dengan konstitusi.

* 1. Kekuasaan politik

Aspek yang keenam adalah kekuasaan dan politik yang meliputi: sistem pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, budaya politik, pers dalam masyarakat demokrasi.

* 1. Ideologi pancasila

Aspek berikutnya adalah pancasila yang merupakan dasar negara. aspek ini meliputi proses perumusan pancasila sebagai dasar negara, kedudukan pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, pengamalan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari, pancasila sebagai ideologi terbuka.

* 1. Globalisasi

Aspek yang terakhir adalah globalisasi. Aspek globalisasi meliputi: politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, globalisasi yang terjadi di lingkungannya, dampak yang ditimbulkan globalisasi, hubungan internasional dan pengertian organisasi internasional, dan evaluasi globalisasi. (Abdul Rozak S.Pd, 2022).

* 1. **Hubungan Pendidikan Kewarganegaraan dengan Objek Penelitian**

Pendidikan kewarganegaraan adalah area yang paling terkait dengan persiapan individu sebagai warga negara yang aktif dan bertanggung jawab, serta memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berkaitan dengan kewarganegaraan. (Hilburn dan Maguth, 2014).

Para peserta didik yang mempelajari bagaimana berkomitemen dan berpartisipasi dalam demokrasi di lingkungan pendidikan dapat mengalami transformasi karena mereka dapat mengartikan pembelajaran kewarganegaraan sebagai proses untuk mengembangkan kemampuan untuk partisipasi politik yang lebih efektif, melalui proses pembelajaran ini mereka memperoleh pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang esensial untuk demokrasi, hubungan antara tingkat pengetahuan kewarganegaraan dan tingkat partisipasi politik pelajar. Menunjukan pentingnya mentransmisikan pengetahuan kewarganegaraan dengan baik kepada warga negara, sehingga mereka merasa tertarik untuk berpartisipasi aktif dalam melayani masyarakat.

**2.1.4 Budaya Politik**

1. **Pengertian Budaya Politik**

Budaya politik adalah corak perilaku masyarakat dalam kehidupan berbangsa, pemerintahan nasional, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat dan norma, merupakan budaya yang harus di patuhi oleh semua anggota masyarakat setiap hari. Budaya politik juga dapat diartikan sebagai sistem nilai bersama sosial, yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan perumusan keboijakan publik dari seluruh masyarakat. Dalam pembentukkan proses kerukunan dalam masyarakat dan pemerintahan, karena sistem politik itu sendiri adalah keterkaitan antara hubungan manusia, itu terkait dengan kekuasaan, aturan dan otoritas (M. Darwis, 2021).

Budaya politik berkaitan dengan orientasi politik dan sikap warga negara dalam sistem politik, serta sebuah sikap dari warga negara terhadap sistem politik tersebut, dengan kata lain buadaya politik yang berlaku disejumlah negara memiliki konsekuensi yang signifikan untuk dukungan politik (Robi Ulzikri et al., 2021).

Menurut Gabriel A. Almond dalam Jumili Arianto (2017 :6) budaya politik adalah sikap, keyakinan, nilai dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga cenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dari populasi. Masyarakat Indonesia yang sangat heterogenitas ini juga sudah pasti memiliki pola-pola khusus tersendiri dan juga prinsip-prinsip tersendiri, termasuk juga memiliki budaya politik tersendiri. Hal itu juga tidak terlepas dari berbagai faktor, diantaranya adalah faktor geografis dan kebudayaan masing-masing daerah yang sangat berbeda-beda. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sangat berbeda jauh dari konsep dan sistem pemerintah negara lain di dunia. Oleh karenanya budaya politik tentu juga akan sangat berbeda dari negara manapun. Indonesia juga memiliki keunikan dan khas tersendiri, terutama dalam bidang kehidupan berpolitik, mulai dari masyarakat awam sampai pada tingkat elite.

Berikut ini adalah beberapa pengertian budaya politik yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk lebih memahami secara teoritis sebagai berikut (Amirudin setiawan, 2018) :

1. Budaya politik adalah aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan, adat istiadat, tahayul, dan mitos. Kesemuanya dikenal dan diakui oleh Sebagian besar Masyarakat. Budaya politik tersebut memberikan rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain.
2. Budaya politik dapat dilihat dari aspek doktrin dan aspek generiknya, yang pertama menekankan pada isi atau materi, seperti sosialisme, demokrasi, atau nasionalisme. Yang kedua (aspek generk) menganalisis bentuk, peranan, dan ciri-ciri budaya politik, seperti militant, utopis, terbuka, atau tertutup.
3. Hakikat dan ciri budaya politik yang menyangkut masalah nilai-nilai adalah prinsip dasar yang melandasi suatu pandangan hidup yang berhubungan dengan masalah tujuan.
4. Bentuk budaya politik menyangkut sikap dan norma, yaitu sikap terbuka dan tertutup, tingkat militansi seseorang terhadap orang lain dalam pergaulan masyarakat. Pola kepemimpinan (konformitas atau mendorong inisiatif kebebasan), sikap terhadap mobilitas (mempertahankan status quo atau mendorong mobilitas), prioritas kebijakan (menekankan ekonomi atau politik).

Dengan pengertian budaya politik diatas, nampaknya membawa kita pada suatu pemahaman konsep yang memadukan dua tingkat orientasi publik, yaitu sistem dan individu. Dengan orientasi yang bersifat individual ini, tidaklah berarti bahwa dalam memandang sistem politiknya kita menganggap masyarakat cenderung bergerak kearah individualisme. Jauh dari anggapan yang demikian, pandangan ini melihat aspek individu dalam orientasi politik hanya sebagai pengakuan akan adanya fenomena dalam masyarakat secara keseluruhan tidak dapat melepaskan diri dari orientasi individual.

Budaya politik mengandung 3 (tiga) komponen obyek politik sebagai berikut:

1. Orientasi kognitif yaitu berupa pengetahuan tentang dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya serta input dan outputnya.
2. Orientasi afektif yaitu perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan penampilannya.
3. Orientasi evaluatife yaitu keputusan dan pendapat tentang onyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan (Amiruddin setiawan, 2018).
4. **Tipe-tipe Budaya Politik**

Berdasarkan Tipe,budaya politik terbagi menjadi tiga bagian yaitu :

1. Budaya politik parokial

Budaya politik parokial adalah tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan dengan faktor kongnitif (misalnya tingkat Pendidikan relatife rendah). Budaya politik parokial merupakan ciri budaya yang paling rendah. Dalam budaya politik ini Masyarakat tidak merasakan bahwa mereka adalah warga negara dari suatu negara, mereka lebih mengidentifikasikan dirinya pada perasaan lokalitas. Tidak terdapat kebanggaan sistem politik tersebut, mereka tidak memiliki perhatian terhadap apa yang terjadi dalam sistem politik, pengetahuannya sedikit tentang sistem politik, dan jarang membicarakan masalah -masalah politik. Budaya politik semacam ini juga mengidentifikasikan bahwa Masyarakatnya tidak memiliki minat maupun kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik (Syuhada, 2020).

Budaya politik parokial ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Amiruddin setiawan, 2018):

1. Frekuensi orientasi terhadap sistem sebagai obyek umum, obyek-obyek input, obyek-obyek output, dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati nol.
2. Tidak terdapat peran-peran politik yang khusus dalam masyarakat.
3. Orientasi parokial menyatakan alpanya harapan-harapan akan perubahan yang komparatif yang diinisiasikan oleh sistem politik
4. Kaum parokila tidak mengharapkan apapun dari sistem politik.
5. Parokialisme mumi berlangsung dalam sistem tradisional yang lebih sederhana dimana spesialisasi politik berada pada jenjang sangat minim.
6. Parokialisme dalam sistem politik yang diferensiatif lebih bersifat afektif dan normative dan kognitif.
7. Budaya politik kaula/subjek

Budaya politik kaula adalah dimana anggota masyarakat mempunyai minat perhatian, mungkin pula kesadaran terhadap sistem sebagai keseluruhan, terutama terhadap segi outputnya. Sedangkan perhatian (yang frekuensinya sangat rendah) atas aspek input serta kesadarannya sebagai aktor politik dapat dikatakan rendah atau tidak ada. Masyarakat dengan budaya politik kaula menggap dirinya tidak berdaya mempengaruhi atau mengubah sistem, dan oleh karena itu menyerah saja kepada segala kebijaksanaan dan Keputusan para pada pemegang jabatan dalam masyarakat (Kantaprawira, 2019).

Dalam budaya politik sistem kaula/subjek ini memilikiciri khas diantaranya (Amiruddin setiawan, 2018):

1. Terdapat frekuensi orientasi politik yang tinggi terhadap sistem politik yang diferensiatif dan aspek output dari sistem itu, tetapi frekuensi orientasi terhadap obyek-obyek input secara khusus dan terhadap pribadi sebagai partisipan yang aktif mendekati nol.
2. Para subyek menyadari akan otoritas pemerintah
3. Hubungannya terhadap sistem politik secara umum, dan terhadap output, administratif secara esensial meruapakan hubungan yang pasif.
4. Sering wujud di dalam masyarakat dimana tidak terdapat struktur input yang terdiferensiansikan.
5. Orientasi subyek lebih bersifat afektif dan normatif dari pada kognitif.
6. Budaya politik partisipan

Budaya politik partisipan terbentuk melalui pengetahuan, kesadaran dan partisipasi politik warga negara. pengetahuan politik merupakan konsep utama dalam perilaku politik. Pengetahuan politik merupakan dasar dari perilaku politik seseorang yang didapatkan melalui sosialisasi politik yang pernah didapatkannya. Pengetahuan politik salah satunya dengan memberikan Pendidikan politik yang dilakukan dengan cara sosialisasi politik oleh lembaga, partai, atau tokoh-tokoh yang ada dalam masyarakat (Agus et al., 2020).

Dalam budaya politik partisipan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Amiruddin setiawan, 2018):

1. Frekuensi orientasi sistem politik sebagai obyek umum, obyek-obyek input, output, dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati satu.
2. Bentuk kultur dimana anggota-anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem politik secara komprehensif dan terhadap struktur dan proses politik serta administrative (aspek input dan output sistem politik).
3. Anggota masyarakat partisipatif terhadap obyek politik
4. Masyarakat berperan aktivis.

**2.1.5 Budaya Organisasi Literatu**r

* 1. **Pengertian Budaya Organisasi Literatur**

Budaya Organisasi Literatur mencakup nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur tindakan para anggota kelompok, yang menunjukan prioritas atau tujuan organisasi serta upaya untuk mengarahkan perilaku yang diharapkan dari para anggota. Budaya organisasi ini bervariasi dari satu organisasi ke organisasi lainnya, tergantung pada perkembangan nilai-nilai dan norma-norma yang dikembangkan (Harwiki, 2016). Griffen dan Ebbert dalam Adinata (2015) mengungkapkan bahwa budaya organisasi bisa diartikan pengalaman, Sejarah, keyakinan dan norma-norma bersama yang menjadi ciri perusahan atau organisasi.

Budaya Organisasi Literatur menurut Robbins mengemukakan bahwa budaya organisasional sering kali digambarkan dalam arti yang dimiliki bersama. Pola-pola dari kepercayaan, simbol-simbol, ritual-ritual, dan mitos yang berkembang kewaktu-waktu dan berfungsi sebagai perekat yang menyatukan organisasi.

Sementara itu Robbins (2018) menjelaskan mengenai tiga kekuatan untuk mempertahankan suatu budaya organisasi sebagai berikut :

1. Praktik seleksi, proses seleksi bertujuan untuk mengidentifikasi dan mempekerjakan individu-individu yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan sukses dalam organisasi.
2. Manajemen puncak, tindakan manajemen puncak mempunyai dampak besar pada budaya organisasi. Ucapan dan perilaku mereka dalam melaksanakan norma-norma sangat berpengaruh terhadap anggota organisasi.
3. Sosialisasi dimaksudkan agar para karyawan baru dapat menyesuaikan diri dengan budaya organisasi.
   1. **Fungsi dan Pengembangan Budaya Organisasi.Literatur**

Budaya organisasi memiliki fungsi yang sangat penting. Fungsi budaya organisasi adalah sebagai tapal batas tingkah laku individu yang ada didalamnya. Dikemukan oleh menurut Robbins dalam Muh. Hidayat H. Yusuf (2017: 88). Antara lain sebagai berikut :

1. Budaya menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dan yang lain
2. Budaya membawa suatu rasa indentitas bagi anggota-anggota organisasi
3. Budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas dari pada kepentingan diri individual seseorang.
4. Budaya merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk dilakukan oleh karyawan.
5. Budaya sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan.
6. **Budaya Organisasi di Lembaga Pendidikan.**

Kondisi eksternal organisasi yang sangat cepat berubah merupakan sebuah tantangan dari organisasi untuk dapat hidup terus. Sebagaimana mahluk hidup, organisasi juga harus pandai menyesuaikan diri dengan lingkungannya jika menginginkan untuk hidup dalam usia yang lebih panjang. Ketidak mampuan organisasi menyesuaikan diri dengan lingkungannya akan dapat menyebabkan organisasi tersebut mengalami masalah serius, bahkan berakhir kamtian (kerugian). Dalam kasus kondisi pendidikan di Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan sekolah, perubahan tersebut dapat dilihat pada berbagai hal, mulai dari kebijakan penyelenggaraan dari pemerintah, sampai dengan perubahan hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Muh. Hidayat H. Yusuf, 2017).

Sekolah sebagai organisasi pembelajaran merupakan Kumpulan dari individu-individu pembelajaran yang ada didalamnya. Di samping itu sekolah dapat dikatakan sebagai organisasi pembelajaran apabila memiliki ciri-ciri: pertama, sekolah memberikan kesempatan dan mendorong setiap individu yang ada didalamnya untuk terus belajar dan memperluas kapasitas dirinya. Kedua, sekolah tersebut merupakan organisasi yang siap menghadapi perubahan dengan mengelola perubahan itu sendiri (Muh. Hidayat H. Yusuf, 2017).

Dalam hal ini, Peter Senge membagi lima bentuk capaian dalam budaya organisasi pembelajaran diantaranya:

1. Keahlian Pribadi (*Personal mastery*).

Adalah suatu budaya dan norma organisasi yang diterapkan sebagai cara bagi semua individu dalam organisasi untuk bertindak dan melihat dirinya.

1. Model metal *(mental model)*

Adalah suatu prinsip yang mendasar dari organisasi pembelajar. Di sisi lain dapat diartikan sebagai suatu aktivitas perenungan yang dilakukan dengan terus-menerus memperbaiki gambaran-gambaran di sekitar, dan melihat bagaimana hal itu membentuk tindakan dan Keputusan kita.

1. Visi bersama *(Shared vision).*

Meruapakn suatu gambaran umum dari organisasi dan Tindakan (kegiatan) organisasi yang mengikat orang-orang secara bersama-sama dari keseluruhan identifikasi yang dituju.

1. Pembelajaran Tim *(Team Learning)*

Yaitu suatu keahlian dalam percakapan dan keahlian berpikir kolektif dalam organisasi. Kemampuan dimana membentuk individu-individu cakap dalam percakapan dan cakap dalam berpikir kolektif, sehingga dapat meningkatkan kecerdasan dan kemampuan sebuah organisasi.

1. Pemikiran sistem (system Thingking)

Merupakan kerangka kerja konseptual, dimana suatu cara dalam menganalisis dan berpikir tentang suatu kesatuan dari seluruh prinsip-prinsip organisasi pembelajar (Muhaimin, 2012: 87-95).

**2.2 Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya bertujuan untuk memperbaiki teori yang akan digunakan dalam menganalisis penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, serta mencarai bahan perbandingan dan referensi. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesan bahwa penelitian ini serupa dengan penelitian sebelumnya sebagai berikut:

* 1. Penelitian oleh Nadita Anggi tentang “Pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih pemula di SMA N 4 Tanjung Jabung Timur untuk menghadapi pemilihan umum tahun 2024” tahun 2023. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam penelitian ini memfokuskan pada permasalahan pada pemilih pemula untuk mengetahui dan menganalisis upaya dalam melaksanakan pendidikan politik pada pemilih pemula di SMA N 4 Tanjung Jabung Timur dalam menghadapi pemilihan umum tahun 2024. Sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan pada Pendidikan Politik Di Pelajar Pada Pemilihan Umum Presiden 2024, Namun terdapat sedikit kesamaan permasalahan yaitu belum banyak diketahuinya pendidikan politik terhadap pemilihan umum, dikalangan pelajar di SMK.
  2. Penelitian oleh Bagas Pangestu Putra “Pendidikan politik generasi muda di era disrupsi studi kasus: DPW Partai Amanat Nasional DKI Jakarta’ tahun 2022. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam penelitian ini memfokuskan pada permasalahan pada partai amanat nasional berperan dalam melakukan Pendidikan politik terhadap generasi muda pada era disrupsi dan dampak dari kegiatan pendidikan politik yang diselenggarakan oleh parati amanat nasional. Sedangkan dalam penelitian di atas memfokuskan pada Pendidikan politik di generasi muda pada era disrupsi oleh partai amanat nasional, sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan pada pendidikan politik di pelajar pada pemilihan umum Presiden 2024 untuk pandangan pelajar dalam literasi pendidikan politik dalam pemilihan umum.
  3. Penelitian oleh Rahmat Farizi tentang “persepsi santri terhadap pemilihan umum di kecamatan jaya kabupaten aceh jaya menjelang pemilihan umum 2024” Tahun 2023. Dalam penelitian ini menegaskan pendidikan politik terhadap santri secara menyeluruh bisa dikatakan sudah mendapatkan pendidikan politik yang maksimal, hal ini dapat dilihat para santri yang sudah mengetahui tentang pemilihan umum. Kemudian mempengaruhi perilakunya sehingga perilaku ini akan bisa ditarik kepartisipasi dan masalahnya yaitu persepsi dan sikap santri terhadap pemilihan umum 2024.

Perbedaan pada penelitian diatas yaitu di lihat dari objek yang diambil, penelitian tersebut pada pondok pesantren pada santri yang ada di kecamatan jaya kabupaten aceh jaya. Sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan pada Pendidikan politik di pelajar pada pemilihan umum Presiden 2024 di SMK Negeri 1 Warureja, namun terdapat sedikit kesamaan permasalahan yaitu belum banyak diketahuinya terhadap pemilihan umum, dikalangan pelajar ataupun santri.

* 1. Penelitian Jurnal oleh Zaenal Ahmad, Usman Thamrin, dan Rudy Santoso tentang “Sosialisasi Pendidikan Politik bagi pemilih pemula di SMK Negeri 5 Kabupaten Bulukumba” Tahun 2023. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam penelitian ini memfokuskan pada pemahaman politik mereka masih terbatas, dengan adanya Pendidikan politik akan meningkatkan pengetahuan pemilih pemula pada peserta didik.

Perbedaan pada penelitian diatas yaitu di lihat dari subjek yang diambil, penelitian tersebut pada sosialisasi pada pelajar yang ada di SMK Negeri 5 Kabupaten Bulukumba. Sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan pada Pendidikan politik di pelajar pada pemilihan umum Presiden 2024 di SMK Negeri 1 Warureja, namun terdapat sedikit kesamaan permasalahan yaitu belum banyak diketahuinya terhadap pemilihan umum, dikalangan pelajar.

**2.3 Kerangka Pikir**

Kerangka berfikir menurut Dr. Sugiyono (2013) adalah penjelasan, secara teoritis relevansi antar variabel yang akan di teliti, jadi perlu di jelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Hal ini terjadi apabila penelitian lebih dari satu variabel.

Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka pemikiran berpikir dari penelitian ini sebagai berikut :

Pelajar di SMK Negeri 1 Warureja

Gambar 1.1 Kerangka Pikir

Kendala dalam melaksanakan pendidikan politik di pelajar pada pemilihan umum Presiden 2024 di SMK Negeri 1 Warureja

Upaya dalam melaksanakan Pendidikan politik di pelajar pada pemilihan umum Presiden 2024 di SMK Negeri 1 Warureja

Pendidikan politik untuk pelajar:

1. Aspek kognitif Pendidikan politik
2. Aspek afektif Pendidikan politik
3. Aspek psikomotorik Pendidikan politik

Pandangan literasi pendidikan politik pada pemilihan umum Presiden 2024

**BAB 3**

**METEDOLOGI PENELITIAN**

**3.1 Pendekatan dan Desain Penelitian**

**3.1.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan sistematis dan logis dalam mengumpulkan data untuk mencapai tujuan tertentu (N Harahap, 2020:17).

Pendekatan kualitatif merupakan produser penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diteliti (Moleong dalam kartikasari, 2013).

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. Jenis studi kasus merupakan serangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan secara teliti dan mendalam terhadap suatu program, peristiwa, atau aktivitas tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang hal tersebut, baik pada tingkat individu, kelompok, lembaga, atau organisasi. Kasus yang dipilih dalam penelitian ini adalah peristiwa yang aktual dan sedang berlangsung, bukan peristiwa yang sudah lampau (Mudjia Raharjo :2017).

Menurut A Anggito & J Setiawan (2018 :9-14) karakteristik penelitian kualitatif yaitu :

* 1. Penelitian kualitatif mempunyai ciri yang secara kualitatif harus observasi langsung kelapangan dengan mencermati serta harus berperan secara mendalam sampai memperoleh secara rinci data yang di inginkan.
  2. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan harus mendeskripsikan suatu objek, fenomena yang akan digambarkan dalam karya tulis yang bersifat naratif.
  3. Penelitian kualitatif tidak mencari data fakta untuk kepentingan bukti atau penolakan, namun mencari fakta yang berbagai macam yang nantinya akan disimpulkan.
  4. Penelitian kualitatif sangat mengutamakan makna karena peneliti telah menggali data sampai mendalam.
  5. Penelitian kualitatif menjadikan focus studi sebagai batas penelitian sehingga tidak menjadikan kebingungan dalam menverifikasi, mereduksi dan menganalisis data.

Penelitian kualitatif adalah suatu proses ilmiah secara teratur untuk mengumpulkan data, mengorganisirkannya secara kohensif, serta menganalisis dan menginterpretasikan informasi dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dengan menggunakan penelitian studi kasus memusatkan perhatian pada suatu objek tertentu yang diangkat sebagai sebuah kasus untuk dikaji secara mendalam sehingga mampu membongkar realitas di balik fenomena.

**3.1.2 Desain Penelitian**

Desain penelitian yang dijadikan pedoman bagi peneliti dalam merancang penelitian yaitu sebagai berikut :

Gambar 2.1. Desain Penelitian

Pendidikan politik di kalangan pelajar pada pemilihan umum Presiden 2024 di SMK NEGERI 1 WARUREJA

Penyajian Hasil Analisis

Anasisi Data

Pengumpulan Data

**3.2 Prosedur Penelitian**

Prosedur penelitian merupakan urutan kegiatan penelitian untuk memperoleh suatu kebenaran penelitian. Berikut merupakan urutan prosedur penelitian :

1. Tahap Pra Penelitian

Sebagai langkah pertama dalam merancang penelitian, untuk mengidentifikasi sebuah masalah, menetapkan tujuan dari penelitian, merumuskan judul, memilih lokasi penelitian, serta mempertimbangkan relevansi masalah yang akan diteliti maka diperlukan sebuah Tahap Pra penelitian.

Setelah dosen pembimbing menyetujui masalah dan judul penelitian, maka peneliti melakukan studi pendahuluan untuk memperoleh gambaran awal tentang subjek yang akan diteliti. Sebelum memulai penelitian, peneliti juga harus mengurus surat perizinan dari pihak yang berwenang, seperti lembaga Universitas Pancasakti Tegal dan melanjutkan mengurus perizinan di instansi lembaga Pendidikan SMK Negeri 1 Warureja, agar nanti proses pengumpulan data berjalan lancar tanpa kendala apapun.

Setelah memperoleh gambaran subjek yang akan diteliti dan masalah yang sesuai dengan keadaan objektif dilapangan, kemudian peneliti menyusun proposal penelitian.

1. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Setelah menyelesaikan tahap sebelumnya, peneliti kemudian memulai penelitian lapangan. Pada tahap ini, peneliti akan menggali informasi dan data secara mendalam dari responden yang menjadi objek penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan melalui cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Pada tahap pelaksanaan penelitian ini peneliti mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menghubungi Kepala sekolah ataupun wakil kepala sekolah SMK Negeri 1 Warureja untuk meminta informasi dan meminta izin untuk melaksanakan penelitian dilingkungan sekolah, serta menetukan informasi yang akan diwawancarai.
2. Mengubungi guru pengampu mata pelajaran PPKn untuk mengadakan wawancara
3. Menghubungi peserta didik untuk mengadakan wawancara
4. Melakukan dokumentasi dan membuat catatan wawancara yang diperlukan yang dianggap
5. Melakukan pendampingan pendidikan politik di SMK Negeri 1 Warureja

**3.3 Sumber Data**

Sumber data merupakan faktor yang sangat penting dalam penelitian, karena dengan sumber data dapat ditentukan cara mengenalisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua sumber data, yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya oleh peneliti. Peneliti mengumpulkan data secara langsung dari sumber pertama atau lokasi di mana objek penelitian berada. Selain itu, data primer juga bisa di dapat dari hasil wawancara yang diperoleh dari berbagai informan mengenai pokok penelitian yang relavan sebagai data primer (Sugiyono 2018:456).

1. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan informasi yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti, tetapi melalui perantara seperti memberikan data kepada pengumpul data, contohnya lewat orang lain, dokumen ataupun web (Sugiyono, 2018:456). Dalam penelitian ini, sumber data sekunder mencakup jurnal, buku, dan artikel, yang relavan dengan permasalahan mengenai literasi pelajar terhadap Pendidikan politik dan padangan pelajar tentang pendidikan politik dan pemilihan umum, peran serta pelajar pada pemilihan umum.

**3.4 Wujud Data**

Menurut Lofland dalam (Moleong 2014: 157-159) wujud data dalam penelitian kualitatif terbagi dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto atau statistik.

1. Kata-kata dan Tindakan

Penelitian ini menggunakan tindakan orang yang diamati dan diwawancarai sebagai sumber utama data. Data diperoleh melalui wawancara yang dilakukan selama pengamatan (Moleong, 2019:157).

Sumber data utama ditulis melalui catatan atau rekaman video/audio, pengambilan foto atau gambar maupun video, serta penulisan sumber data utama melalui wawancara adalah hasil dari upaya mengamati, mendengarkan, dan bertanya.

1. Sumber tertulis

Dilihat dari segi sumber data, informasi tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dikelompokkan sebagai buku jurnal ilmiah, arsip, dokumen pribadi atau dokumen resmi. Meskipun sumber verbal atau non-tulisan dianggap sebagai sumber kedua, pentingnya sumber tertulis ini tidak boleh diabaikan.

1. Foto

Foto sering menghasilkan data deskriptif yang berguna dan sering digunakan untuk mempelajari karakteristik, subjektif dan hasilnya sering diperiksa secara induktif. Gambar yang diambil oleh individu dan foto yang diambil oleh peneliti sendiri merupakan dua jenis foto yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif.

**3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Karena tujuan utama penelitian adalah untuk mengumpulkan data, teknik pengumpulan data adalah elemen penting yang paling strategis dalam proses penelitian. Metode pengumpulan data untuk penelitian ini meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi.

Macam-macam teknik pengumpulan data antara lain :

1. Observasi

Menurut Creswel dalam Sidiq dan Choiri (2019 :67)) observasi adalah metode di mana peneliti secara langsung mengamati orang-orang sebagai subjek observasi, dan lingkungan mereka untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Dalam peneliti ini, peneliti menggunakan observasi lapangan untuk megamati aktivitas yang terkait dengan pendidikan pitik di pelajar sekolah, dengan tujuan untuk mengembangkan literasi pendidikan politik

Peneliti melakukan observasi partisipasi dengan maksud untuk memperoleh informasi, data yang lengkap, dan rinci mengenai bagaimana Pendidikan politik di kalangan pelajar pada pemilihan umum Presiden 2024 di SMK Negeri 1 Warureja, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal.

1. Wawancara *(interview)*

Percakapan yang dilakukan dengan tujuan adalah wawancara. Dalam wawancara ini, pewawancara bertanya kepada orang yang diwawancarai, yang memberikan tanggapannya, sehingga terjadi dialog antara keduanya. Dalam konteks penelitian, peneliti menggunakan strategi wawancara terstruktur di mana semua subjek penelitian diminta untuk menjawab pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan tujuan penelitian tersebut (Moleong, 2014:186). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah ataupun Wakil Kepala Sekolah,Guru pengampu mata pelajaran PPKn dan Peserta didik di SMK Negeri 1 Warureja.

Dalam kegiatan wawancara peneliti menggunakan panduan wawancara agar kegiatan wawancara ini memperoleh keterangan dan informasi tentang peran dan fungsi pelajar pada pemilihan umum.

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencatat peristiwa yang telah terjadi, dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang. Contoh dari dokumentasi berbentuk tulisan meliputi catatan harian, Sejarah kehidupan *(Life histories),* cerita, biografi, dan peraturan kebijakan. Sedangkan dokumentasi berbentuk gambar, bisa berupa foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Sementara itu, dokumentasi dalam bentuk karya mencakup karya seni seperti gambar, patung, film dan lainnya. Dokumen ini berfungsi sebagai rekaman tertulis, visual, atau monumental yang mempertahankan jejak peristiwa masa lalu. Dalam konteks penelitian termasuk, foto atau gambar peneliti yang diambil oleh peneliti (Sugiyono, 2013: 329).

Metode dokumentasi digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data secara informasi tertulis berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hal ini dilakukan untuk mempertajam metedologi yang dikumpulkan dan mempertajam kajian teoretis.

1. Triangulasi Data

Teknik keabsahan data pada penelitian ini ialah tentang menggunakan teknik triangulasi. Trangulasi adalah untuk uji reliabilitas ini diartikan sebagai verifikasi data SMK Negeri 1 Warureja dengan menggunakan berbagai teknik atau sumber.

Gambar 3.1. Triangulasi

Observasi

wawancara

Dokumentasi Triangulasi teknik

Dengan membandingkan data dari sumber yang sama menggunakan beberapa metode, metodologi triangulasi digunakan untuk menentukan tingkat keabsahan data. Data dikumpulkan melalui wawancara kepala sekolah, guru, dan siswa diverifkasi dengan observasi dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara lebih lanjut dengan guru yang bersangkutan atau individu lain untuk memastikan data akurat, atau mungkin semuanya benar karena perspektifnya berbeda, dan ini menghasilkan data yang bervariasi setelah menggunakan tiga pendekatan untuk menilai keabsahan data.

**3.6 Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2013 :244) analisis data adalah proses menyelidik dan mengumpulkan informasi secara komperhensif dari berbagai sumber seperti wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, proses ini mencakup pemilihan informasi yang relavan untuk diteliti, serta menarik kesimpulan yang dapat dipahami oleh peneliti dan orang.

Ada tiga serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam menganalisis data menurut Miles and Huberman dalam Sidiq dan Choiri (2019:78) yang terdiri sebagai berikut :

1. Reduksi Data *(Data Reduction)*

Jumlah data yang dikumpulkan di lapangan memerlukan pencatatan yang cermat dan menyeluruh. Seperti yang sudah ditetapkan, semakin banyak waktu yang dihabiskan peneliti dilapangan, semakin rumit dan luas jumlah datanya. Oleh karena itu, reduksi data diperlukan segera, diikuti dengan analisi data. Mengurangi data memerlukan kondensasi, memilih hal-hal penting, berkonsentrasi pada apa yang penting, mencari tema dan pola, dan menghilangkan tidak penting. Data yang berkurang akan memberikan gambaran yang lebih baik dan memudahkan peneliti untuk peneliti untuk mengumpulkan data tambahan selanjutnya, dan menemukannya saat dibutuhkan (Sidiq dan Choiri, 2019:79-80).

1. Penyajian Data (Data Display)

Setelah reduksi data, tahap selanjutnya adalah menyajikan data. Data dapat disajikan dalam penelitian kualitatif berupa bentuk ringkasan, grafik, hubungan antara kategori, dan metode sejenis lainnya. Miles dan Huberman berpendapat bahwa teks naratif adalah jenis penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Selain itu, disarankan bahwa saat menampilkan data, selain dalam bentuk prosa naratif, juga dilakukan dalam bentuk grafik, matriks, dan sebagainya (Sidiq dan Choiri, 2019:82).

1. Penarikan Kesimpulan (Conslusion Drawing/Verivication)

Langkah selanjutnya Teknik analisis data pada penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam Sidiq dan Choiri (2019:84) adalah proses kesimpulan dan konfirmasi. Jika bukti pendukung yang kuat ditemukan pada tahap pengumpulan data selanjutnya, kesimpulan tentatife yang diusulkan akan direvisi. Namun hasil yang disajikan merupakan kesimpulan yang kredible jika didukung oleh bukti yang andal dan kosisten ketika peneliti Kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data.